



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DI DESA PULAU KOMANG KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Candra Irawan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : candrairawan201998@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa digunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk perangkat desa berjumlah 10 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 43 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 142 berarti berada pada interval Cukup Baik, karena setiap indikator yang diujikan terdapat hasil yang cukup baik, Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengembangan Kelembagaan Kelompok, Pemupukan Modal Masyarakat, Pengembangan Usaha Produktif dan Penyediaan Informasi Tepat-Guna yang cukup baik untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Komang.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan, Kapasitas Masyarakat

Abstract

This research was conducted in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how to empower the community through community capacity building in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for the village apparatus used a saturated sampling technique, ie all the population was sampled, in which the number of samples for the village apparatus amounted to 10 people, and for the community using a random sampling technique, namely the taking of sample members from the population was carried out randomly without regard to the existing strata. in that population. In which the number of samples for elements of society amounted to 43 people. Analysis of the data used is descriptive quantitative, which analyzes the data obtained from the results of distributing questionnaires, then processed, and then the author draws conclusions from the results of processing the data. The results of the study show that Community Empowerment through Community Capacity Building in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency which produces an average value of 142 means that it is in the Good Enough interval, because every indicator tested has fairly good results, Human Resource Development, Institutional Development Groups, Community Capital Fertilization, Productive Business



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Development and Provision of Appropriate Information for Community Empowerment in Pulau Komang Village.

Keywords : Community Empowerment Improvement, Community Capacity

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Oleh karena itu Pemberdayaan merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berarti berkecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, serta kesehatan. Kesejahteraan secara batin adalah seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum, hal ini dapat dicapai melalui Pemberdayaan masyarakat, dalam berbagai bidang. Saat ini karena ketidakberdayaan masyarakat menjadi salah satu sumber dari permasalahan nasional yang sedang dihadapi saat ini. Ketidakberdayaan itu mulai dari kelompok yang paling kecil, keluarga atau rumah tangga, sampai dengan kelompok yang besar, seperti lembaga lembaga pemerintahan

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. desa diberikan penghormatan terhadap adat istiadat dan hak asal usul desa, begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin atau kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Konsep pemberdayaan terkait dengan pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini adalah salah satu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada



masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
3. Kelompok perempuan,
4. Kelompok tani,
5. Kelompok masyarakat miskin,
6. Kelompok nelayan,
7. Kelompok pengrajin,
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. Kelompok pemuda; dan
10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa

Dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan, pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong terwujudnya sebuah kesejahteraan. Salah satunya adalah dengan memberikan program-program yang mendukung peningkatan kapasitas masyarakat

Dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan, pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong terwujudnya sebuah kesejahteraan. Salah satunya adalah dengan memberikan program-program yang mendukung peningkatan kapasitas masyarakat.

Begitulah yang terjadi pada objek penelitian peneliti pada kali ini didesa Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintah desa sangat berperan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa harus dapat melihat potensi yang dimiliki desa. seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, dalam hal ini pemerintah desa menyusun program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya, seperti dapat dilihat pada buku rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa), terlihat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat yang direncanakan yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat. Program yang disusun pada buku RPJM Desa diharapkan dapat menjadi strategi pemerintah desa dapat melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik.

Namun berdasarkan observasi penulis dilapangan terdapat beberapa masalah dengan program pemberdayaan diantaranya :

1. Pemberdayaan masyarakat tidak optimal, Pelaksanaan pemberdayaan di desa Pulau Komang belum optimal, banyak yang tidak terlaksana dengan baik, dimana pelaksanaan hanya sekedar terlaksana saja tanpa benar-benar memperhatikan hasil pelaksanaannya.



2. Pada kegiatan pelatihan kerajinan dan pelatihan jahit + bordir, terlihat Kurangnya partisipasi antusias dari masyarakat, dan setelah mendapatkan pelatihan, peserta pelatihan tidak melanjutkan usaha dengan keterampilan yang didapat dengan berbagai alasan, seperti tidak adanya modal usaha. Berdasarkan keterangan dari beberapa warga yang mengikuti pelatihan, pelatihan yang dilakukan sangat mendasar dan tidak akan bisa apabila langsung dengan membuka usaha seperti yang di programkan, selain masyarakat tidak memiliki alat jahit, harusnya ada wadah tempat hasil karya masyarakat di pasarkan, begitulahnya dengan pelatihan perbengkelan, pelatihan seperti sekedar terlaksana saja, pelatihan menumpang di bengkel setempat dengan pelatihnya mekanik di bengkel tersebut, namun tidak benar-benar ada pelatihan dan tidak menghasilkan apa-apa untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan.
3. Pada pelatihan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan itu hanya sekedar terlaksana saja dan antusias masyarakat pun kurang karena masyarakat lebih menginginkan bantuan modal seperti bibit bukan pelatihan-pelatihan yang dinilai sangat mendasar.
4. belum dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), segala bentuk pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan perangkat desa.
5. Terdapat beberapa program pemberdayaan tidak terlaksana dikarenakan dana di alokasikan untuk bantuan sosial.

Berdasarkan Hasil Observasi penulis dilapangan tersebut terlihat bahwa kurang maksimalnya Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang di buat pemerintahan Desa Pulau Komang ini, Peningkatan Kapasitas Masyarakat ini tidak benar-benar dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengangkat judul yaitu “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang di sebut “adminstrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika di bubuhi awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan dinamikanya. (Ali, 2015:19)

Menurut Ali Setelah administrasi menjadi ilmu yang mandiri dengan struktur formal atau deskriptif ataupun fungsional serta di pengaruhi oleh pemikiran rasional munculah teori perilaku (*behavior theory*) dalam administrasi yaitu teori yang melihat kelemahan-kelemahan teori structural yang mengabaikan dimensi-dimensi dan prinsip-prinsip non hierarkis teori prilaku dalam administrasi ini melakukan pengkajian terhadap dimensi-dimensi kemanusiaan, dimensi kebutuhan, dan hasrat manusia dalam administrasi. (Ali, 2015:100)

Menurut Atmosudirdjo Administrasi adalah sesuatu yang terdapat di dalam suatu organisasi tersebut, sehingga organisasi itu tidak dapat berkembang. (dalam



Ngusmanto,2015:15). Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya (Siagian, 2007:4), dan Menurut Simmon Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. (dalam Syafii, 2010: 13)

Ilmu administrasi negara adalah ilmu pengetahuan (cabang, ilmu administrasi) yang secara khas melakukan kajian terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-struktur dan proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting dari pada sistem dan aparatur pemerintahan. (Anggara, 2012 : 159)

Dalam proses operasi adminstrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkaitan antara satu dan yang lain, yang apabila salah satu unsur nya tidak ada, proses administrasi akan pincang, unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut : (Anggara, 2012 : 29)

1. Organisasi, yaitu wadah beagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
2. Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas kerja, hubungan ini meliputi :
 - a. Perencanaan
 - b. Pembuatan keputusan
 - c. Pembimbingan
 - d. Pengorganisasian
 - e. Pengawasan (kotntrol)
 - f. Penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja
3. Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah fikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama.
4. Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang di perlukan.
5. Keuangan, yaitu pengelolaan dalam segi-segi pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan.
6. Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan, dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja.
7. Tata usaha, yaitu penghimpun, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang di perlukan.
8. Hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama. (Anggara, 2012 : 29)

Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009 : 21)

Fungsi administrasi menurut Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu (Anggara, 2012:144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan



Fungsi-fungsi yang dimaksud di anggap sebagai basic process of administration, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan di lakukan (*Planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan di lakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*Organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*Staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*Directing*). Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang di harapkan (*Controlling*)

Tujuan administrasi secara umum adalah sebagai berikut (Apanadi, 2020 : 18) :

1. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan relasi dengan memperhatikan norma dan lingkungan masyarakat.
2. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.
3. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat/dokumen sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok lembaga.
5. Menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak.
6. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan sehingga segala aspek keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

2.1.2 Teori Pemerintahan Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada



masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - h. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;



- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.1.3 Teori Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber (dalam Silalahi, 2011 : 124). menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins (dalam Edison, dkk 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly (dalam Edison, dkk 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.



Menurut Khalil (dalam Edison, dkk 2016 : 49) organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan.

Menurut Etzioni (dalam Silalahi, 2011 : 125) organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko dalam Edison, dkk (2016 : 5) walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karena tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], hal ini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda.

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut : (Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur



Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otorisasi yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Menurut Gordon (dalam Siswanto, 2007 : 90) ada tiga bentuk struktur organisasi yang cukup populer dan selama ini dipegunakan dalam organisasi publik, yaitu :

- a. Lini, Bentuk lini merupakan struktur yang paling sederhana. Lini ditandai dengan garis hubungan yang bersifat vertical antara setiap tingkatan organisasi. Semua anggota organisasi menerima perintah melalui prinsip scalar. Struktur kewenangan dalam bentuk ini sangat jelas dan dikembangkan dalam organisasi



- yang memiliki ruang lingkup kecil. Sistem pembagian perintah dari pucuk pimpinan kepada bawahan menyangkut seluruh kegiatan operasional dan kegiatan penunjang, sehingga semua struktur di bawah manajer terlibat dalam kegiatan operasional.
- b. Lini dan Staf, Bentuk lini dan staf menghasilkan konstruksi struktur yang agak berbeda dengan yang pertama karena adanya tambahan staf. Staf hanya merupakan fasilitator, dan membantu tugas pimpinan seperti memberikan masukan, nasihat, membantu pengawasan. Akan tetapi, staf tidak memiliki otoritas dan hubungan langsung kepada bawahan. Staf diangkat berdasarkan keahlian yang dimiliki.
 - c. Matrix, Bentuk matrix adalah bentuk organisasi proyek. Bentuk ini merupakan kombinasi sumber daya manusia dan non manusia yang diolah bersama-sama dan bersifat sementara, dan dibuat untuk tujuan khusus.

2.1.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan (2012 : 10)

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Mangkunegara, 2010 : 2)

Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012 : 21) ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan
Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (*organization chart*).
3. Pengarahan
Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
4. Pengendalian
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan
Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan



Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

7. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusannya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebabsebab lainnya

G.R. Terry Mengatakan manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. (dalam Mangkunegara, 2017 : 07).

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikuti sertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai/karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Manajemen ini sendiri mendefinisikan sebagai proses pengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategi organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Sagala, 2013 :13).

a. Perencanaan



Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen dikembangkan. Menurut Schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison, dkk 2017 : 6).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab, apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.



2.1.5 Teori Pemberdayaan

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat setempat. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 100)

Pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. (Slamet dalam Mardikanto & Soebiato, 2019 : 100)

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Bertolak dari pemahaman pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
2. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.
3. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 105)

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 111)

1. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
2. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.



4. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitra usaha.
5. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
7. Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
8. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
9. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan tiga pendekatan meliputi : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 161)

1. Pendekatan Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervension*. Tujuan utamanya adalah Membimbing atau melatih penerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2. Pendekatan Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat). Pemberdayaan dilakukan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanyadigunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pegetahuan, keterampilan sikap-sikap klien (penerima manfaat) Agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Pendekatan Makro, pendekatan ini disebut juga sebgai strategi sistem besar (*Large-System Strategy*), karena penerimma manfaat perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien (Penerima manfaat) sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 161)

Startegi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan tertentu atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengam : metoda, teknik, atau taktik. Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 168)

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat
2. Pemanjapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat,
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada pasrtisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 169)



1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yan ada, dari hasil temuan engamatan lapangan.
2. Membangun pemahaman, komitmen unntu medorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Menurut Prijono (1996) mengemukakan lima strategi pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu; (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 170)

1. Program pengembangan sumber daya manusia,
2. Program pengembangan kelembagaan lokal
3. Program pemupukan modal swasta,
4. Program pengembangan usaha produktif, dan
5. Program penyediaan informasi tepat guna.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode penelitian Kuantitatif adalah adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2019 : 16).

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2012 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang digunakan pada penelitian menghasilkan rata-rata adalah 142 dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 107 -159, terlihat dengan pemerintah desa merencanakan program pemberdayaan apa yang cocok untuk desa sesuai dengan potensi desa masing-masing, mengadakan musyawarah bersama lembaga-lembaga desa tentang program pemberdayaan, yang mana sebagai keputusan pemerintahan desa dalam melaksanakan program pemerintahan desa untuk peningkatan kapasitas masyarakat, melaksanakan kegiatan program-program pemberdayaan sesuai dengan kajian-kajian yang telah disepakati melalui musyawarah desa bersama lembaga-lembaga yang berkepentingan, pemerintah desa menggali potensi yang ada dilingkungan desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan,



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pemerintah desa mensosialisasikan kepada masyarakat melalui undangan agenda rapat desa, membentuk tim program pemberdayaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah di programkan, pemerintah desa untuk memajukan kelompok-kelompok usaha ekonomi desa di desa pulau komang kecamatan sentajo raya, terlihat dengan mengundang kelompok-kelompok usaha ekonomi untuk diberikan penyuluhan, menganggarkan melalui alokasi dana desa melalui kelompok-kelompok usaha ekonomi, sebagai bentuk permodalan untuk meningkatkan mmotivasi masyarakat, pemerintah desa cukup baik dalam menyusun kegiatan-kegiatan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Desa Pulau Komang kecamatan sentajo raya, terlihat dengan pemerintah desa aktif untuk memotivasi pembentukan kelompok-kelompok ekonomi, menyampaikan kepada masyarakat agar membentuk kelompok usaha ekonomi sesuai dengan jumlah kelompok yang telah ditentukan, membentuk pengurusan dalam kelompok tersebut, memberikan pembekalan, membantu memfasilitasi dan membantu dalam bentuk sumber dana baik itu dari dana desa, kabupaten ataupun provinsi, pemerintah desa cukup baik dalam pemerintah desa dalam mendorong anggota kelompok untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan kelompok usaha di desa pulau komang kecamatan sentajo raya, terlihat dengan pemerintah desa mengundang anggota kelompok dan pengurusannya disetiap musyawarah yang telah di agendakan, baik undangan maupun lisan, dan merencanakan program pelatihan tujuan untuk mendorong anggota kelompok-kelompok usaha, Pemerintah desa membantu melalui program-program pemberdayaan, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Namun Untuk permodalan, Pemerintah Desa Pulau Komang tidak memberikan modal yang berbentuk uang untuk modal usaha masyarakat, karena dalam masa pandemi saat ini dana desa banyak digunakan untuk penanganan pandemi dan bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang kurang mampu, APBDesa diprioritaskan untuk penanganan covid-19 dengan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang di atur sesuai undang-undang, pemerintah desa memang cukup membantu dalam bentuk permodalan untuk pemberdayaan masyarakat yang bersumber diluar dana desa, pemerintah desa membantu mendaftarkan prakerja diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dengan melalui pelatihan yang diselenggarakan prakerja. pemerintah desa Membantu masyarakat yang memiliki usaha untuk mengajukan bantuan UMKM ke pemerintah pusat, pemerintah desa cukup baik memfasilitasi dalam bentuk sarana dan prasarana usaha di desa pulau komang kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi, terlihat dengan pemerintah desa Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi, dengan memperbaiki jalan-jalan desa, usaha tani, membantu alat-alat pengolahan makanan dan alat-alat pertanian. Pemerintah desa untuk memajukan kelompok-kelompok usaha ekonomi desa di desa pulau komang kecamatan sentajo raya, terlihat dengan mengundang kelompok-kelompok usaha ekonomi untuk diberikan penyuluhan, menganggarkan melalui alokasi dana desa melalui kelompok-kelompok usaha ekonomi, sebagai bentuk permodalan untuk meningkatkan mmotivasi masyarakat, pemerintah desa cukup baik dalam menyusun kegiatan-kegiatan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Desa Pulau Komang kecamatan sentajo raya, terlihat dengan pemerintah desa aktif untuk memotivasi pembentukan kelompok-kelompok ekonomi, menyampaikan kepada masyarakat agar membentuk kelompok usaha ekonomi sesuai dengan jumlah kelompok yang telah ditentukan, membentuk



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pengurusan dalam kelompok tersebut, memberikan pembekalan, membantu memfasilitasi dan membantu dalam bentuk sumber dana baik itu dari dana desa, kabupaten ataupun provinsi, pemerintah desa cukup baik dalam pemerintah desa dalam mendorong anggota kelompok untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan kelompok usaha di desa pulau komang kecamatan sentajo raya, terlihat dengan pemerintah desa mengundang anggota kelompok dan pengurusannya disetiap musyawarah yang telah di agendakan, baik undangan maupun lisan, dan merencanakan program pelatihan tujuan untuk mendorong anggota kelompok-kelompok usaha. Pemerintah desa menyediakan setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui spanduk/baleho, melalui mesjid, media sosial, papan informasi dikantor desa dan juga menggunakan cara tradisonal canang (berkeliling kampung menyampaikan informasi dengan menggunakan pengeras suara), pemerintah desa Memberikan dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang penggunaan dan pemakaian teknologi, dan pemerintah desa selalu memberikan masyarakat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi baik dalam musyawarah desa maupun secara langsung ke kantor desa. Pemdes selalu ada dikantor selama jam kerja.

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 142 berarti berada pada interval Cukup Baik, Berdasarkan hasil observasi penulis memang Cukup baiknya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ini, karena setiap indikator yang diujikan terdapat hasil yang cukup baik, Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengembangan Kelembagaan Kelompok, Pemupukan Modal Masyarakat, Pengembangan Usaha Produktif dan Penyediaan Informasi Tepat-Guna yang cukup baik untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda dan Ibunda yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Sahri Muharam, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing I, Bapak Drs.H. Sumarli, MM, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatik menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Anggara, Sahya, 2012. Ilmu administrasi Negara. CV Pustaka Setia : Bandung



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Apandi, Yulianti Devi. 2020. Administrasi Perkantoran Dan Logistik. Pustaka Ali Imron : Lampung
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta : Bandung
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu. 2012. Manajemen Sumber Daya manusia. PT Bumi. Aksara : Jakarta
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. 2019. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta : Bandung.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Ngusmanto. 2015. Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan. Mitra. Wacana Media, Jakarta
- Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta
- Rivai Dan Ella Sagala, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta
- Salam, Abdus. 2007, Manajemen Personal (Manajemen Sumber Daya Manusia), Ghalia, Jakarta
- Silalahi, Ulber. 2011. Asas – asas manajemen. Bandung : PT. Refika Aditama
- Siagian, Sondang P, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2007, Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi. Bina Aksara, Jakarta
- Siswanto. 2007. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sumodiningrat. Gunawan 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan. Pengaman Sosial. PT Gramedia Pustaka.
- Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT. Refika Aditama. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761